

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Gerakan Sosial

Macionis (1999:607) dalam Oman (2016:1) mengatakan Gerakan Sosial (social movement) merupakan tipe paling penting dari perilaku kolektif (*collective behavior*). Beberapa sosiolog menyebut gerakan sosial lebih sebagai suatu bentuk dari tindakan kolektif (*collective action*) daripada perilaku kolektif (*collective behavior*). Mereka berpendapat bahwa gerakan sosial berbeda dengan bentuk-bentuk perilaku kolektif.

Tindakan kolektif didefinisikan sebagai setiap tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan status, kekuasaan, atau pengaruh dari seluruh kelompok, bukan untuk seorang atau beberapa orang (Zomerren, 2009:646) dalam Oman (2016:1).

Selain itu, Locher (2002:233) dalam Oman (2016:2) menyatakan bahwa perbedaan gerakan sosial dari bentuk perilaku lainnya, seperti: *crowd* (kerumunan), *riot* (kerusuhan dan *rebel* (penolakan, pembangkangan) dapat dilihat dari tiga aspek, yakni (a) Pengorganisasian (*Organized*); (b) Pertimbangan (*Deliberate*); dan Daya Tahan (*Enduring*). Adapun tabel perbedaan antara gerakan sosial dan bentuk perilaku kolektif yang lainnya berdasarkan ketiga aspek tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Perbedaan Bentuk Gerakan Sosial dan Perilaku Kolektif

Aspek	Bentuk Perilaku Kolektif (<i>Collective Behavior</i>)	
	Gerakan Sosial (<i>Social Movement</i>)	Bentuk Lainnya (<i>Crowd, Riot, Rebel, Feds</i>)
<i>Organized</i> (Pengorganisasian)	Diorganisir dengan baik; terdapat pembagian tugas, strategi dirancang dengan hati-hati, ada pemimpin (<i>leaders</i>) yang jelas.	Sebagian besar tidak diorganisir dengan baik; kerja sama antarpartisipan hanya bersifat sesaat; pemimpin (<i>leaders</i>) tidak jelas.
<i>Deliberate</i> (Pertimbangan)	Atas dasar pertimbangan; keterlibatan partisipan didasarkan atas pertimbangan dan kesadaran; adanya dorongan keanggotaan; melakukan publisitas dan berusaha mencari dukungan dari banyak orang.	Terjadi tanpa adanya perencanaan terlebih dahulu; tidak ada pertimbangan dan kesadaran penuh dari partisipan atas keterlibatannya.
<i>Enduring</i> (Daya Tahan)	Waktunya relatif lama.	Waktunya sangat singkat.

Sumber: Oman (2016:3)

Macionis (1999:607) dalam Oman (2016:4) menyatakan bahwa *social movement* adalah aktivitas yang diorganisasikan yang ditujukan untuk mendorong atau menghambat suatu perubahan sosial. Dari definisi gerakan

sosial sebagaimana yang dikemukakan Macdonald tersebut, maka dapat digarisbawahi dua hal ciri utama dari gerakan sosial, yakni: adanya aktivitas yang diorganisir dan adanya tujuan yang berkaitan dengan suatu perubahan sosial.

Sementara, Locher (2002:231) dalam Oman (2016:4) berpendapat bahwa ketika sekelompok orang mengatur (mengorganisir) diri dalam upaya untuk mendorong atau menolak beberapa jenis perubahan sosial, maka mereka sedang menciptakan sebuah gerakan sosial. Orang-orang dengan sedikit atau banyak kekuatan politik yang dimilikinya, kemudian mereka bergabung secara bersama-sama untuk mendapatkan atau memperjuangkan beberapa hal, yakni suatu perubahan sosial, maka mereka sedang melakukan gerakan sosial. Lebih lanjut Locher mengatakan bahwa sebagian besar teoritis perilaku politik (*collective behavior*) memandang gerakan sosial (*social movement*) sebagai suatu tipe dari perilaku kolektif (*collective behavior*), tetapi banyak dari teoritis gerakan sosial (*social movement*) memandang bahwa gerakan sosial (*social movement*) merupakan fenomena yang terpisah dari perilaku kolektif (*collective behavior*).

Adapun tipe gerakan sosial menurut Spencer (1982:506) dalam Oman (2016:18) yang menyebutkan bahwa berdasarkan tujuannya, terdapat tujuh tipe gerakan sosial, yakni:

(1) *Revolutionary Movement* (Gerakan Revolusi) merupakan tipe gerakan yang dramatis, yang berusaha menggulingkan otoritas yang sudah mapan, apabila diperlukan bisa saja menggunakan kekerasan, misalnya gerakan bersenjata;

(2) *Reform Movement* (Gerakan Reformasi) ditujukan untuk memperbaiki atau mengoreksi persoalan-persoalan yang muncul, misalnya gerakan perempuan dan hak-hak sipil;

(3) *Reactionary Movement* (Gerakan Reaksi) suatu gerakan yang menginginkan situasi kehidupan dikembalikan kepada tatanan masa lalu, menganggap bahwa tatanan lama lebih baik daripada tatanan yang sekarang;

(4) *Conservative Movement* (Gerakan Konservatif) suatu gerakan yang sederhana yang ditunjukan untuk mempertahankan dan menjaga nilai-nilai tata cara kehidupan mereka, misalnya gerakan kelompok konservatif untuk mempertahankan bangunan lama dan memperlambat laju pertumbuhan dan perubahan kota besar;

(5) *Utopian Movement* (Gerakan Utopia) suatu gerakan yang bertujuan jangka panjang, menginginkan suatu tipe baru dari suatu masyarakat yang berbeda dengan saat ini;

(6) *Religious Movement* (Gerakan Religius) suatu gerakan yang memiliki tujuan religius, misalnya gerakan mistik, dsb; dan

(7) *Ethnic or Nationalistic Movement* (Gerakan Etnis/Nasionalis) merupakan tipe gerakan yang sangat penting dewasa ini dalam membuat suatu perubahan di seluruh dunia, misalnya *The Chikano, Black and American Indian Movement*.

Adapun berbagai pendapat tentang tipe-tipe dari *Social Movement* sebagaimana dijelaskan di atas menurut beberapa sosiolog dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2

Tipe *Social Movement* menurut pendapat para sosiolog

No	Tipe <i>Social Movement</i>	Sosiolog			
		Macionis	Zanden	Spencer	Locher
		Sasaran dan Tingkat Perubahan	Basisi Tujuan Ideologis	Tujuan Perubahan	Sasaran dan Aspek Perubahan
1.	<i>Alternative/ Expressive/ Conservative</i>	Perubahan terbatas, hanya kepada sebagian populasi.	Melakukan perbaikan atau memperbaharui dari nilai-nilai individu.	Menjaga/mempertahankan nilai-nilai cara hidup.	Perubahan pikiran dan spesifik tertentu beberapa orang.
2.	<i>Redemptive/ resistance/ reaction</i>	Perubahan yang lebih radikal (mendasar), pada fokus yang terbatas (selektif)	Mencegah suatu perubahan dan mengeliminasi suatu perubahan sebelum dilembagakan.	Kembali ke tatanan nilai masa lalu.	Perubahan kehidupan beberapa orang melalui transformasi lengkap.
3.	<i>Reformative</i>	Perubahan sosial yang terbatas, dengan target setiap orang.	Perubahan yang ingin mengimplementasikan sistem nilai/ ideology	Memperbaiki Problem yang terjadi.	Perubahan sikap masyarakat terhadap topic atau isu yang terbatas tidak

			secara lebih kuat lagi.		ingin merubah atau mengganti pemerintahan yang ada.
4.	<i>Revolutionary</i>	Paling ekstrim, melakukan transformasi dasar terhadap masyarakat.	Perubahan yang ingin mengganti nilai/ideologi secara fundamental.	Menggulingkan kekuasaan/kewenangan yang sudah mapan.	Melakukan transformasi total dari masyarakat menghancurkan tatanan lama dan digantikan dengan tatanan baru.
5.	<i>Utopian</i>	-	-	Membentuk masyarakat tipe baru yang berbeda dengan kenyataannya saat ini	-
6.	<i>Religious</i>	-	-	Membentuk masyarakat yang lebih religius.	-
7.	<i>Ethnic/ Nationalistic</i>	-	-	Membangun kesadaran etnis	-

Sumber: Oman (2016:19-20)

a. Indikator Praktis Gerakan Sosial

Lofland dalam Rifana (2019) mengatakan ada 6 (enam) indikator yang praktis untuk menganalisis gerakan sosial sekaligus sebagai petunjuk praktis bagi pelaku gerakan sosial untuk merancang atau paling tidak memicu gerakan sosial, diantaranya :

1) Kepercayaan

Hal-hal yang dianggap benar (ideology, doktrin, pandangan, harapan, kerangka berpikir, wawasan, perspektif).

2) Organisasi

Cara bagaimana orang-orang yang mempunyai pandangan yang sama, diatur/diarahkan untuk mencapai tujuan.

3) Sebab-sebab

Variabel-variabel yang berpengaruh terhadap gerakan sosial dimulai/dibentuk, kapan gerakan itu dibentuk, mengapa gerakan itu muncul.

4) Keikutsertaan

Keanggotaan dalam arti yang paling lemah sampai yang paling kuat. Mengapa orang ikut dalam gerakan, seberapa jauh keterlibatannya dalam organisasi, siapa yang menjadi pendukung gerakan.

5) Strategi

Cara atau metode untuk melakukan sesuatu dalam rangka mencapai tujuan, usaha-usaha apa yang dilakukan untuk mencapai

tujuan gerakan, tujuan utama dari setiap strategi yang digunakan, akan lebih menekankan yaitu pada perubahan institusi-institusi sosial (social manipulation) atau dengan mengubah hati dan pemikiran orang-orang (personal transformation).

6) Efek

Tanggapan atau reaksi kalangan luar terhadap gerakan sosial (reaksi penguasa, elit, media, sesama gerakan sosial).

b. Tahap-tahap dalam Gerakan Sosial

Macionis (1999:623) dalam Oman (2016:26) mengatakan bahwa terdapat empat tahapan dalam proses gerakan sosial, yakni:

1) Emergence (Tahap Kemunculan)

Gerakan sosial didorong oleh suatu persepsi bahwa segalanya tidak baik (all is not well). Beberapa gerakan perempuan dan hak asasi sipil, misalnya muncul karena penyebaran ketidakpuasan (spread dissatisfaction). Sementara gerakan-gerakan yang lainnya muncul sebagai kesadaran yang dipelopori oleh kelompok-kelompok kecil tentang beberapa isu tertentu.

2) Coalescence (Tahap Penggabungan)

Setelah kemunculan, suatu gerakan sosial harus mendefinisikan dirinya sendiri dan mengembangkan strategi untuk “menuju publik” (going public). Pemimpin (leader) harus menentukan kebijakan, memutuskan suatu taktik, membangun moral, dan melakukan rekrutmen keanggotaan baru. Dalam tahap ini, gerakan mungkin

terlibat dalam tindakan kolektif seperti demonstrasi untuk menarik perhatian media massa dan perhatian publik.

3) Bureaucratization (Tahap Birokratisasi)

Agar menjadi sebuah kekuatan politik (a political force), suatu gerakan sosial harus memiliki sifat-sifat birokrasi. Dengan demikian, gerakan akan menjadi mapan (established), ketergantungan terhadap charisma pemimpin akan sedikit menurun karena akan digantikan oleh staff yang mumpuni. Apabila suatu gerakan sosial tidak menjadi mapan maka akan beresiko mudah hilang (dissolving).

4) Decline (Tahap Kemunduran/Penurunan)

Pada akhirnya, suatu gerakan sosial akan kehilangan pengaruhnya. Ada lima alasan mengapa suatu gerakan sosial mengalami kemunduran (Macdonis, 1999: 623), yakni:

- a) Aktivitas suatu gerakan sosial mengalami kemunduran karena dianggap telah berhasil dalam mencapai tujuannya (success);
- b) Suatu gerakan sosial mengalami kegagalan karena adanya kelemahan atau pertentangan dalam internal organisasi (failure due to organizational weakness of internal strife);

- c) Satu gerakan sosial mengalami kemunduran karena adanya kooptasi atas para pemimpin gerakan (co-optation of leaders);
- d) Suatu gerakan sosial mengalami kemunduran karena adanya tekanan (repression), terutama dari pihak eksternal; dan
- e) Suatu gerakan sosial mengalami kemunduran karena gerakan tersebut terbentuk ke dalam pengarusutamaan (establishment within mainstream). Beberapa gerakan dapat diterima ke dalam bagian dari suatu sistem sehingga tidak ada tantangan atas status quo.

c. Gerakan Sosial Baru

Singh (2010:20-21), gerakan-gerakan sosial mengekspresikan usaha-usaha kolektif masyarakat untuk menuntut kesetaraan dan keadilan sosial serta mencerminkan perjuangan-perjuangan masyarakat untuk membela identitas-identitas dan warisan-warisan kultural mereka. Singh pun mengatakan gerakan sosial dan aksi sosial tidak hadir begitu saja dalam masyarakat, tetapi kemunculannya seiring dengan adanya suatu konflik dan pergulatan-pergulatan di seputar persoalan-persoalan seperti halnya ketimpangan, dominasi, kebebasan dan keadilan sosial.

Teori Gerakan Sosial Baru (*New Social Movement Theory*) merupakan suatu pendekatan teoritis terbaru yang menjelaskan tentang perubahan karakter dari Gerakan Sosial Lama. Gerakan Sosial Baru menekankan ciri khas gerakan sosial dalam perkembangan masyarakat

pasca-industri di Amerika Utara dan Eropa Barat (Macionis, 1999:621) dalam Oman (2016).

Situmorang (2007:24-25) Pada periode 1960-an, perkembangan teori gerakan sosial memasuki era baru terutama di negara-negara Amerika Utara dan Eropa Barat yang ditandai dengan ditransformasikannya gerakan sosial klasik menjadi gerakan sosial yang lebih modern. Teori gerakan sosial baru memiliki beberapa ciri utamanya.

Pertama, memandang dan menempatkan aktivitas gerakan sosial sebagai sebuah aksi kolektif yang rasional dan memiliki nilai positif. Kedua, memperbaiki dan mengkontekstualisasikan teori-teori gerakan sosial sebelumnya menjadi lebih kekinian seperti menggeneralisasikan teori eksploitasi kelas menjadi teori keluhan yang lebih cocok dipergunakan dalam konteks saat ini dimana aksi-aksi tidak hanya didorong oleh eksploitasi kelas pemilik alat produksi terhadap buruh di masyarakat kapitalis. Ketiga, semakin banyak riset dan studi gerakan sosial yang membuat kajian gerakan sosial semakin kaya. Dan keempat, teori gerakan sosial modern berhasil mengidentifikasi faktor-faktor yang memfasilitasi tumbuhnya gerakan sosial, kuat lemahnya dan berhasil atau tidaknya sebuah gerakan sosial.

d. Karakteristik Gerakan Sosial Baru

Pichardo dalam Oman (2016:119), paradigma Gerakan Sosial Baru (GSB) secara fundamental memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan paradigm Gerakan Sosial Lama. Karakteristik dari Gerakan Sosial Baru dapat dilihat dari empat aspek, diantaranya:

1) Tujuan dan Ideologi (*Ideology and Goals*),

Faktor sentral karakteristik dari GSB adalah pandangan ideology yang berbeda. Paradigma GSB mencatat bahwa Gerakan Sosial kontemporer merepresentasikan keterputusan dari gerakan era industrial. Bukan memfokuskan pada redistribusi ekonomi (seperti gerakan kelas-pekerja), Gerakan Sosial Baru menekankan perhatian kepada kualitas hidup dan gaya hidup. Dengan demikian, Gerakan Sosial Baru mempertanyakan kekayaan yang berorientasi tujuan materialistic dari masyarakat industrial. Mereka juga mempertanyakan struktur dari representasi demokrasi yang membatasi masukan dari partipasi warga negara dalam pemerintahan, yang tidak mendukung demokrasi langsung, kelompok-kelompok swadaya, gaya kooperatif dari organisasi sosial. Nilai-nilai dari GSB berpusat dalam otonomi dan identitas.

2) Taktik (*Tactis*)

Taktik dari Gerakan Sosial Baru merupakan cerminan orientasi ideology. Keyakinan dalam karakter yang tidak mewakili tentang demokrasi modern adalah konsisten dengan orientasi taktik anti

institusi. GSB lebih suka untuk tetap berada diluar saluran politik normal, menggunakan taktik mengganggu dan memobilisasi opini public untuk mendapatkan pengaruh publik. Mereka juga cenderung menggunakan bentuk demonstrasi yang sangat dramatis dan direncanakan dengan representasi simbol dan kostum.

3) Struktur, (*Structure*),

Sikap anti-institusi dari Gerakan Sosial Baru juga meluas kepada cara mereka mengatur. Gerakan Sosial Baru berupaya untuk mereplikasi dalam struktur mereka sendiri jenis perwakilan pemerintahan yang mereka inginkan. Tipe ideal gaya organisasi dari Gerakan Sosial Baru tidak harus dilihat sebagai organisasi yang mencerminkan gaya dari setiap Gerakan Sosial Baru.

4) Partisipan (*Participants*)

Pandangan tentang partisipan dalam Gerakan Sosial Baru adalah bahwa mereka tidak didefinisikan oleh batas kelas tetapi ditandai oleh perhatian umum atas isu-isu sosial. Basis partisipan Gerakan Sosial Baru adalah ideologi, bukan etnis, agama maupun komunitas berbasis kelas. Offe dalam Oman (2016:123) menawarkan pandangan yang berbeda tentang siapa partisipan dari gerakan sosial baru. Menurutnya partisipan dari Gerakan Sosial Baru dapat digambarkan dari tiga sector, yakni kelas menengah baru, elemen-elemen dari kelas menengah lama dan populasi yang terdiri

dari orang-orang yang tidak banyak terlibat dalam pasar kerja seperti mahasiswa.

Sementara itu, Jean Cohen dalam Singh (2010:129) menyatakan GSB membatasi diri dalam empat pengertian diantaranya:

- a) Umumnya aktor-aktor GSB tidak berjuang demi kembalinya komunitas-komunitas utopia tak terjangkau di masa lalu.
- b) Aktor-aktornya berjuang untuk otonomi, pluralitas dan keberbedaan tanpa menolak prinsip-prinsip egalitarian formal dari demokrasi, parlemen, partisipasi politik dan representasi publik pada struktur yudiris.
- c) Para aktornya melakukan upaya sadar untuk belajar dari pengalaman masa lalu untuk merelatifkan nilai-nilai mereka melalui penalaran, kecuali dalam kasus ekspresi fundamentalis GSB.
- d) Para aktornya mempertimbangkan keberadaan formal negara dan ekonomi pasar.

Singh (2010:179) menyatakan dalam perspektif historis, gerakan sosial muncul dalam berbagai wajah dan bentuk yang berubah-ubah. Jadi, gerakan sosial tidaklah seperti arus yang sama-sama bergerak mengalir ke sungai yang sama, sebagai sesuatu yang telah ditakdirkan sebelumnya, tujuannya sebagaimana yang digambarkan oleh Marx pada fase pemikirannya yang lebih tua,

namun lebih merupakan sebuah arus-arus relasi yang saling bertemu: arus-arus cita-cita, kemauan dan aksi. Celah-celah dalam struktur sosial itu memberi arus gerakan sosial untuk mengalir. Dalam gerakannya yang terus menerus turun-naik, gerakan sosial mungkin tumbuh secara lebih nyata dalam pengalaman, pengetahuan dan kesadaran manusia ketimbang dalam bidang disiplin ini atau itu pada masa ini atau itu.

Selain itu, Singh pun menyampaikan bahwa dalam perjalanannya gerakan-gerakan sosial tersebut seringkali mengalami disintegrasi untuk kemudian muncul kembali di ruang dan waktu yang lain. Gerakan-gerakan sosial memproduksi dan mereproduksi mereka sendiri, suatu cara dimana masyarakat mempertahankan keberlangsungannya melalui proses memproduksi dan mereproduksi dirinya yang unik. Jika kita melekatkan sifat kesejarahan pada gerakan sosial maka objek studi sebenarnya bukanlah gerakan sosial itu sendiri, melainkan bentuk-bentuk dan ekspresi-ekspresi gerakan sosial itu beserta klaim-klaim perjuangan dan gerak pertarungannya. Hal tersebut dikarenakan masyarakat dan eksistensinya memang terletak dalam gerakan-gerakan sosial dan aksi-aksi manusia. Oleh karena itu, gerakan sosial secara historis bersifat beraneka bentuk (*Polimorphous*).

2. Hak Asasi Manusia

Istilah HAM menurut bahasa Prancis "*droit de l'homme*", dalam bahasa Inggris adalah "*human rights*", sedangkan menurut bahasa Belanda "*memen rechten*". Secara umum hak asasi manusia diartikan sebagai hak-hak dasar yang dimiliki setiap manusia yang dibawa sejak dinyatakan telah bernyawa sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Artinya, hak asasi ini bukan diberikan atau pemberian orang lain, golongan, atau negara, tetapi sudah melekat sejak seseorang memiliki nyawa meskipun masih dalam kandungan (Pangestuti dan Khamdan, modul, 2017:4).

Selain itu dalam modul yang disampaikan dalam Diklat Latihan Dasar, Pangestuti dan Khamdan (2017:4) mengatakan HAM tidak dapat diambil atau dicabut, diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh suatu kekuasaan melainkan harus dihormati, dipertahankan, dan dilindungi. Di sinilah letak perbedaan yang fundamental antara masyarakat yang menjunjung ketuhanan dengan masyarakat yang mengedepankan nilai-nilai selain Tuhan. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia karena ia sebagai manusia, bukan memiliki hak tersebut karena diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif yang mengaturnya, tetapi semata-mata martabatnya sebagai manusia. Oleh karenanya, walaupun manusia terlahir dengan keadaan kulit hitam, cokelat, putih, kelamin laki-laki maupun perempuan, bahasa yang berbeda-beda, budaya yang beragam, maka ia tetap mempunyai hak-hak tersebut.

Cassel dalam Alkostar (2004:1) mengatakan Nilai-nilai Hak Asasi Manusia adalah kebebasan, kesetaraan, otonomi dan keamanan. Lebih dari itu, inti nilai dari Hak Asasi Manusia adalah martabat manusia.

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) disebutkan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Mencuatnya isu HAM menunjukkan bahwa HAM baik pada tataran domestik maupun internasional telah diterima secara luas. Namun banyak masalah, bahkan dari masalah-masalah yang paling dasar belum memperoleh jawaban final. Misalnya apakah HAM dipandang sebagai hak ilahi, moral atau hukum, apakah dasar pembenaran HAM berdasarkan teori hukum alam, sehingga legitimasinya pada kontrak sosial yang bersifat individualis atautkah keabsahan HAM pada prinsip-prinsip keadilan atau hukum positif (Atmadja, *dkk.*, 2011:15).

Gaffar (2012:28) Hak Asasi Manusia juga sangat erat kaitannya dengan demokrasi. Keduanya merupakan dua isu yang menjadi orientasi dan kerangka perubahan di era reformasi. Demokrasi dan HAM sejatinya bukan isu baru, hampir seluruh negara di dunia saat ini menyatakan diri sebagai negara demokrasi dan menghormati HAM.

Akan tetapi dalam praktiknya masih terdapat beberapa negara termasuk Indonesia yang memang belum memberikan jaminan atas Hak yang dimiliki setiap warga negaranya. Bahkan kasus-kasus HAM yang terjadi di masa lalu pun belum tuntas sampai saat ini.

Untuk dapat menjalankan demokrasi sudah pasti harus ada jaminan kebebasan berkeyakinan, berpendapat, serta berserikat. Jaminan atas hak dan kebebasan pun semakin berkembang seiring dengan perkembangan demokrasi. Artinya Hak Asasi Manusia harus benar-benar dijalankan oleh negara sebagai suatu prasyarat dalam negara demokrasi. Apabila Hak Asasi Manusia belum dapat dijalankan ataupun dihormati secara penuh maka demokrasi dalam negara tersebut dapat dikatakan belum berjalan (Gaffar 2012:31).

Dengan demikian, apabila Hak Asasi Manusia tidak dapat dijalankan oleh negara maka hal tersebut akan menjadi ancaman bagi demokrasi. Gaffar (2012:33), kegagalan perlindungan dan pemenuhan HAM akan mengancam demokrasi itu sendiri. Sejarah membuktikan banyak pemerintahan negara yang demokratis ditumbangkan oleh rezim otoriter karena telah gagal melindungi dan memenuhi HAM.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang dijadikan referensi untuk mengkaji penelitian yang sedang diteliti dan tentunya memiliki fokus dan kajian yang hampir sama. Dalam penelitian ini, penulis mengambil penelitian terdahulu dari Muslimin (2016) yang berjudul “Gerakan Sosial Masyarakat Paotere di Kota Makassar”. Penelitian tersebut menggambarkan bentuk perlawanan masyarakat Paotere terhadap perencanaan perluasan area pelabuhan Paotere di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk penganalisaan yang mendalam terhadap kasus yang terjadi.

Gerakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat Paotere ini dilatar belakangi akibat adanya rencana perluasan area pelabuhan sehingga menyebabkan timbulnya perlawanan masyarakat Paotere. Selain itu adapula faktor klaim hak kepemilikan tanah antara masyarakat dan PT. Pelindo IV, masyarakat meyakini bahwa tanah yang selama ini dihuninya merupakan tanah miliknya.

Bentuk perlawanan masyarakat Paotere merupakan bentuk demokrasi gerakan massa yang bersifat langsung dan terbuka dalam memperjuangkan kepentingan yang disebabkan akibat adanya ketidak efektifan sistem.

Adapun persamaan dari penelitian penulis saat ini dengan penelitian terdahulu yang berjudul “Gerakan Sosial Masyarakat Paotere di Kota Makassar” ini diantaranya bahwa setiap gerakan sosial tentunya dapat terjadi akibat adanya sebab dan akibat. Apabila dalam penelitian yang berjudul

“Gerakan Sosial Masyarakat Paotere di Kota Makassar”, gerakan tersebut muncul akibat adanya upaya perluasan area pelabuhan yang mana dalam hal ini mengakibatkan adanya sengketa lahan yang terjadi antara elemen masyarakat dengan PT. Pelindo IV. Sedangkan perbedaan dari dua penelitian ini terdapat dalam fokus penelitian dimana penelitian yang berjudul “Gerakan Sosial Masyarakat Paotere di Kota Makassar” lebih terfokus kepada faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya perlawanan dari elemen masyarakat, sedangkan dalam penelitian ini penulis memfokuskan terhadap gerakan sosial yang dilakukan aksi Kamisan dalam menyikapi kekerasan kemanusiaan di Indonesia.

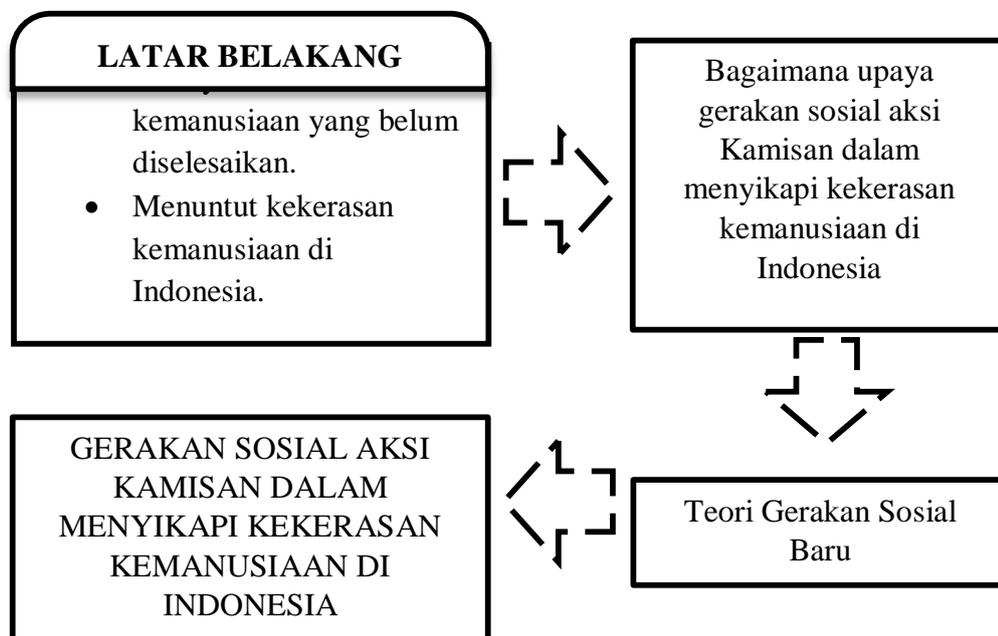
Selain dari penelitian muslimin, adapula penelitian yang dijadikan sebagai literatur ataupun referensi yaitu penelitian Leonardo Julius Putra (2016) dari jurnalnya yang berjudul “Aksi Kamisan: Sebuah Tinjauan Praktis Dan Teoritis Atas Transformasi Gerakan Simbolik”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yang digunakannya yaitu pendekatan studi kasus.

Hasil dari pada penelitian ini menunjukkan bahwa adanya kegagalan dari gerakan banalitas. Putra (2016) dalam jurnalnya mengatakan apa yang para korban/keluarga korban perjuangkan lewat aksi-aksi banalitas di atas ternyata tidak membawa ke arah perubahan yang lebih baik, bahkan keabaian Negara (Presiden dan lembaga-lembaga Negara) dengan kasus mereka semakin menjadi-jadi dengan tidak melanjutkan produk hukum yang sedianya dirancang untuk menuntaskan kasus-kasus kejahatan HAM berat masa lalu.

Adapun yang menjadi faktor kegagalan gerakan banalitas dapat terjadi karena faktor internal maupun eksternal. Dalam jurnalnya Putra (2016) menyebutkan bahwa kegagalan banalitas dari faktor internal diantaranya karena hambatan proses konsolidasi gerakan serta ketiadaan pemimpin gerakan yang berpengaruh secara politis. Sedangkan dari faktor eksternal salah satunya karena kurangnya perhatian dari media.

Dengan demikian, penelitian yang dilakukan diatas menjelaskan bagaimana transformasi suatu gerakan yang dilakukan atau dalam hal ini gerakan banalitas menjadi gerakan simbolik. Transformasi gerakan tersebut tentunya diakibatkan oleh beberapa faktor baik itu eksternal maupun internal.

C. Kerangka Pemikiran



Keterangan:

Dari kerangka pemikiran diatas penulis menjelaskan bahwa alasan penulis mengambil judul gerakan sosial aksi Kamisan dalam menyikapi kekerasan kemanusiaan tersebut dilatar belakangi karena adanya kekerasan ataupun kejahatan kemanusiaan yang pernah terjadi di Indonesia yang mana sampai saat ini belum dapat diselesaikan. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam sejarahnya telah terdapat beberapa korban terkait dengan kasus kemanusiaan seperti penembakan, penculikan sampai penghilangan paksa. Hal tersebut tentunya menjadi pertanyaan besar karena dalam negara demokrasi yang *notabene* nya setiap warga negara diberikan perlindungan khusus atas haknya salah satunya adalah hak untuk hidup.

Adapun beberapa upaya yang dilakukan oleh elemen masyarakat khususnya keluarga korban dan aktivis HAM yakni dengan menggelar aksi dimana aksi tersebut dinamakan dengan Aksi Kamisan. Penulis memandang aksi Kamisan ini merupakan aksi yang cukup konsisten dalam gerakannya mengingat aksi ini dilakukan setiap pekan tepatnya pada hari kamis di depan istana kepresidenan.

Berkat kekonsistennya gerakan aksi Kamisan ini kini telah membuka pandangan masyarakat sehingga saat ini aksi Kamisan mulai tersebar di beberapa kota dan bukan hanya dari keluarga korban saja melainkan mahasiswa sampai *public figure* pun turut menyuarakan tuntutan mengenai kekerasan kemanusiaan. Maka dari itu, dalam penelitian ini rumusan masalah yang diangkat penulis yaitu mengenai gerakan sosial aksi Kamisan dalam menyikapi kekerasan kemanusiaan di Indonesia karena penulis memandang gerakan sosial yang dilakukan oleh aksi Kamisan ini sangat menarik dan tentunya sangat penting untuk dipelajari lebih dalam khususnya dalam kajian gerakan sosial.